



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARYANTO**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **22593**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.435.000.000**

1. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 351 m2/117 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI , Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
4. Tanah Seluas 2.660 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 1.765 m2 di KAB / KOTA KULON PROGO, Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **285.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Z Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SCORPIO Z Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



5. MOTOR, YAMAHA RX KING Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
6. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
7. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 E AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	227.450.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	952.695.382
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.900.145.382
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.900.145.382

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.